



## PENERAPAN PROSEDUR PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA DINAS KEGIATAN OPERASIONAL PADA PT PAL INDONESIA

**Azhar Putri Nabila<sup>a\*</sup>, Munari<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Jurusan Akuntansi, [22013010075@student.upnjatim.ac.id](mailto:22013010075@student.upnjatim.ac.id),  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

<sup>b</sup> Jurusan Akuntansi, [munari.ak@upnjatim.ac.id](mailto:munari.ak@upnjatim.ac.id),  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

\* Korespondensi

### ABSTRACT

*This study discusses the utilization of service progress operational activities at PT PAL Indonesia. The purpose of this study is to evaluate how well the current procedures are implemented and to identify any obstacles that arise during the process of submitting and accounting for service advances. A descriptive qualitative methodology was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the procedures for submitting and reporting service advance payments have been carried out in a structured manner, supported by the digital IM4 system and a layered verification mechanism to minimize errors. However, challenges remain, such as delays in fund disbursement due to budget limitations, which impact the timely execution and reporting of activities. The use of digital technology has proven to enhance efficiency and transparency in managing operational finances. This research provides valuable insights for the development of a more effective and timely service advance management system, while also emphasizing the importance of budget strengthening and employee training to support smooth operations.*

**Keywords:** *advance funds, operational activities, digitalization, accountability*

### Abstrak

Pemanfaatan kemajuan layanan aktivitas operasional di PT PAL Indonesia dibahas dalam studi ini. Tujuan studi ini adalah untuk menilai seberapa baik prosedur saat ini diterapkan dan untuk memeriksa hambatan apa pun yang muncul selama pengajuan dan akuntansi kemajuan layanan. Metodologi kualitatif deskriptif digunakan, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka dinas telah berjalan secara terstruktur dan didukung oleh sistem digital IM4 serta mekanisme verifikasi berlapis untuk meminimalkan kesalahan. Namun, terdapat kendala berupa keterlambatan pencairan dana yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, yang berdampak pada penundaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Pemanfaatan teknologi digital terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan operasional. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem pengelolaan uang muka dinas yang lebih efektif dan tepat waktu, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan anggaran dan pelatihan karyawan untuk mendukung kelancaran proses.

**Kata Kunci:** *uang muka dinas, kegiatan operasional, digitalisasi, pertanggungjawaban*

### 1. PENDAHULUAN

Uang muka dinas kegiatan operasional adalah bentuk pengeluaran dana tunai perusahaan yang bersifat mendesak dan bukti pendukungnya belum bisa dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebagai beban definitif. Kegiatan operasional merupakan jenis kegiatan non pengadaan barang dan jasa untuk mendukung

kelancaran tugas dan fungsi unit kerja. Pemberian uang muka dinas untuk kegiatan operasional dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Agar pelaksanaan uang muka dinas kegiatan operasional berhasil dan optimal diperlukan tata cara kerja yang tertata dengan baik. Prosedur adalah urutan Langkah-langkah yang dirancang secara teratur dan rapi, yang digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan tertentu (Jannata & Vandy, 2024). Prosedur bertujuan untuk menjadi pedoman kerja agar tidak terjadi suatu kesalahan. Uang muka dinas yang telah diterima wajib dipertanggungjawabkan ke divisi keuangan. Pertanggungjawaban (PJK) adalah bentuk pertanggungjawaban penerima uang muka dinas (SKEP PERDIR/04/10000/2021). Laporan pertanggungjawaban terdiri dari rincian penggunaan, dokumen transaksi, serta bukti pengeluaran kas/bank.

Salah satu bisnis utama BUMN, PT PAL Indonesia, memproduksi komponen utama sistem pertahanan Indonesia, khususnya alat tempur laut. Untuk memastikan kelancaran bisnis, PT PAL Indonesia mengalokasikan dana untuk menjaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, agar kegiatan perusahaan tidak terhambat, diperlukan pengelolaan keuangan yang efektif. Biaya operasional merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, bukan biaya produksi (Fathony & Wulandari, 2020).

Proses pelaksanaan uang muka dinas kegiatan operasional di PT PAL Indonesia seringkali terdapat berbagai kendala yang dapat mengurangi efektivitas proses uang muka dinas. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, seperti pencairan dana tertunda akibat belum tersedianya anggaran yang diperlukan dan keterlambatan pertanggungjawaban. Adanya kendala tersebut berdampak pada keterlambatan proses pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap kendala dalam pelaksanaan uang muka layanan di PT PAL Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan uang muka layanan di PT PAL Indonesia dan mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Uang Muka Dinas**

Dalam Keputusan PT PAL Indonesia PERDIR/04/10000/2021 disebutkan bahwa uang muka dinas merupakan salah satu jenis pengeluaran keuangan yang sifatnya mendesak yang dilakukan oleh perusahaan dan bukti pertanggungjawabannya belum dapat ditambahkan pada dokumen pendukung sebagai beban akhir.

Dalam peraturan perusahaan disebutkan bahwa uang muka dinas adalah dana yang secara sah dan formal disediakan untuk membiayai pengeluaran perusahaan berdasarkan pertimbangan untuk menciptakan efisiensi dalam pencapaian target, mengatasi birokrasi dengan tetap menjaga keamanan aset perusahaan, dan mengatasi kebutuhan atau kewajiban mendesak (yang tidak dapat dielakkan) yang menghendaki atau harus dibayar tunai sebelum pengeluaran perusahaan tersebut disetujui secara formal melalui pejabat tertentu yang berwenang (Dini, 2019).

### **2.2 Prosedur Pengajuan dan Pertanggung Jawaban Uang Muka**

Menurut Mulyadi (2016) Untuk menjamin konsistensi pemrosesan transaksi bisnis yang terjadi secara berkala, prosedur adalah serangkaian tugas administratif yang melibatkan banyak personel dalam satu atau lebih departemen. Menurut Nurmalasari, (2018) permintaan uang muka dinas merupakan langkah pengajuan dana sebelumnya yang dilakukan oleh karyawan untuk mendukung kegiatan operasional tertentu, dengan mengikuti prosedur administrasi dan memperoleh persetujuan dari atasan yang berwenang. Pertanggungjawaban uang muka dinas merupakan proses melaporkan penggunaan dana yang telah dipakai, dengan melampirkan bukti pengeluaran, guna memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai keperluannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.3 Kegiatan Operasional**

Biaya operasional untuk bisnis mencakup hal-hal seperti pemasaran, pemeliharaan aset, dan administrasi. Selain biaya produksi dan penjualan langsung, biaya-biaya ini mencakup semua biaya yang dibutuhkan oleh bisnis untuk menjalankan operasi sehari-hari. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi di luar produksi dikenal sebagai biaya operasional (Fathony & Wulandari, 2020).

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan data dari hasil observasi dan wawancara, metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peristiwa. Dengan menguraikan fakta, fitur, dan jumlah kejadiannya secara metodis, pendekatan penelitian deskriptif berupaya untuk memberikan gambaran objektif tentang objek atau subjek yang diteliti (Parasti & Feranika, 2021).

Temuan penelitian ini didasarkan pada data primer. Informasi yang dikumpulkan langsung dari PT PAL Indonesia atau pihak terkait disebut sebagai data primer. Beberapa Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Teknik pertama adalah observasi, yaitu mengamati dan mencatat objek yang diteliti (Sugiyono, 2014). Metode kedua adalah wawancara, yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada informan. Setelah itu, digunakan data sekunder, yaitu data yang sudah terkumpul atau sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Surat Keputusan (SKEP) Uang Muka PT PAL Indonesia.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Prosedur Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Dinas**

Pengajuan uang muka dinas dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat mendesak. Pada saat dana dicairkan, dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban biasanya belum dapat dilengkapi secara menyeluruh. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan yang berlaku, proses pengajuan uang muka dinas dibedakan menurut jenjang persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Pembagian ini dimaksudkan agar setiap permohonan disetujui oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan nilai dana yang diajukan. Kategori Batasan nilai maksimum untuk kegiatan operasional sebagai berikut:

Nilai s/d maksimal Rp 20 juta	:	persetujuan Kepala Divisi.
Nilai di atas Rp 20 juta s/d Rp 100 juta	:	persetujuan Direktur Pembina.
Nilai di atas Rp 100 juta	:	persetujuan Direktur Utama.

Setelah pengajuan uang muka dinas, langkah selanjutnya adalah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SKEP). Menurut surat Keputusan (SKEP) pertanggungjawaban (PJK) untuk kegiatan operasional dilakukan paling lambat 15 hari kerja.

##### **Evaluasi Penerapan Prosedur Uang Muka Dinas**

Penerapan prosedur uang muka dinas di PT PAL Indonesia menunjukkan bahwa sistem yang ada sudah cukup terstruktur dan didukung oleh teknologi pencatatan digital (IM4) serta proses verifikasi berlapis dari Divisi Keuangan untuk mengurangi kesalahan. Meski demikian, pencairan dana tertunda akibat belum tersedianya anggaran yang diperlukan, masih menjadi kendala yang menyebabkan keterlambatan pencairan dan pelaporan pertanggungjawaban. Evaluasi prosedur ini umumnya dilakukan saat terdapat pembaruan regulasi, sehingga pelaksanaannya mengikuti kebutuhan perubahan yang ada. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan percepatan proses persetujuan agar pengelolaan uang muka dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu.

##### **Tantangan dalam Prosedur Uang Muka Dinas**

Pelaksanaan prosedur uang muka dinas di PT PAL Indonesia telah diterapkan secara sistematis dan didukung oleh teknologi digital IM4 serta serangkaian verifikasi yang ketat guna meminimalkan kesalahan. Pengajuan uang muka disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang mendesak dengan persyaratan dokumen pendukung yang jelas dan lengkap seperti memorandum, rincian biaya, formulir bukti pengeluaran kas/bank dan formulir pengajuan atau pertanggungjawaban uang muka dinas. Pengawasan terhadap pertanggungjawaban serta batas waktu penyelesaiannya diatur melalui Surat Keputusan perusahaan, yang juga mencakup pemberian sanksi apabila batas waktu tidak dipenuhi. Meskipun prosedur ini secara umum berjalan dengan baik, terdapat tantangan terkait keterlambatan pencairan dana yang dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan serta pelaporan kegiatan. Oleh karena itu, pengoptimalan sistem pencairan dan pengelolaan dana menjadi aspek penting untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan.

Prosedur pembayaran uang muka resmi telah dilaksanakan di PT PAL Indonesia dengan sistem yang terorganisir dengan baik, sesuai dengan hasil wawancara, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumen

yang dilakukan oleh peneliti di perusahaan tersebut. Proses ini didukung oleh penerapan teknologi digital IM4 serta tahapan verifikasi berlapis untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan. Pengajuan uang muka umumnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang mendesak. Oleh karena itu, dokumen pendukung seperti memorandum dan Bukti pengeluaran kas/bank menjadi syarat penting dalam proses ini. Pengawasan terhadap pertanggungjawaban pengeluaran juga telah diatur secara tegas melalui Surat Keputusan perusahaan, termasuk penerapan sanksi administratif bila pelaporan tidak diselesaikan tepat waktu. Meski secara umum berjalan efektif, masih terdapat tantangan dalam hal keterlambatan pencairan dana, yang dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan anggaran. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta pelaporannya. Untuk itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam menyempurnakan sistem pencairan dana guna mendukung kelancaran operasional secara menyeluruh.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nurmalasari, (2018) bahwa mekanisme permintaan dan pertanggungjawaban uang muka dinas telah dilaksanakan dengan cukup baik dan mengacu pada aturan internal perusahaan. Namun, studi tersebut juga mencatat masih adanya hambatan yang perlu dibenahi agar proses tersebut dapat berlangsung lebih efisien dan efektif. Pemanfaatan sistem digital dalam perusahaan menjadi aspek penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional.

Dengan adanya digitalisasi, berbagai aktivitas dapat dilakukan dengan lebih cepat, terorganisir, dan minim kesalahan. Hal ini secara langsung berdampak pada meningkatnya efisiensi kerja dan membantu perusahaan menjalankan kegiatan secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Arista et al., (2024) bahwa pengembangan sistem digital berbasis web untuk mempermudah pengajuan uang muka kegiatan. Permasalahan pada proses manual yang cenderung lambat dan kurang akurat dalam mengelola dana. Metodologi Pengembangan Aplikasi Cepat (RAD) aplikasi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengajuan sekaligus menjelaskan alur akuntabilitas pendanaan agar lebih terorganisasi dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kesalahan, dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Hasil ini menguatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam proses keuangan bisa menjadi langkah strategis untuk mendukung kelancaran operasional lembaga.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka dinas berjalan secara terstruktur dan cukup efektif. Proses tersebut didukung oleh implementasi teknologi digital IM4 serta mekanisme verifikasi berlapis dari Divisi Keuangan yang bertujuan meminimalkan kesalahan. Sistem persetujuan uang muka disesuaikan dengan tingkat otoritas sesuai nilai pengajuan, sementara pertanggungjawaban diatur melalui kebijakan yang tercantum dalam Surat Keputusan perusahaan. Walaupun pelaksanaan prosedur ini umumnya sudah berjalan dengan tertib, kendala keterlambatan pencairan dana akibat keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan yang berpengaruh pada pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Studi ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai upaya untuk mempercepat prosedur dan meningkatkan efisiensi manajemen keuangan.

Implementasi sistem digital dalam pengelolaan uang muka dinas tidak hanya meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Secara praktis, hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi potensi kesalahan administratif sekaligus mempercepat proses layanan internal. Dari sisi teoritis, kajian ini menegaskan pentingnya penerapan teknologi informasi sebagai bagian integral dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk meningkatkan pengelolaan uang muka dinas, perlu dilakukan percepatan proses persetujuan terutama untuk pengajuan dengan nilai kecil agar lebih efisien. Perusahaan juga harus memperkuat perencanaan dan ketersediaan anggaran guna mencegah keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada operasional. Evaluasi berkala terhadap sistem digital IM4 diperlukan agar sistem tetap sesuai kebutuhan dan dapat mengikuti perubahan regulasi. Selain itu, pelatihan rutin bagi karyawan terkait penggunaan sistem dan prosedur pengajuan uang muka penting dilakukan untuk memastikan proses berjalan optimal dan mengurangi kesalahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Jannata, P. M., & Vendy, V. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Proses Konfirmasi Uang Muka Dinas Operasional Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. *Akuntansi dan Manajemen*, 19(2), 80-93.
- [2] Fathony, A. A., & Wulandari, Y. (2020). Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT. Perkebunan Nusantara VIII. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 11(1), 43-54.
- [3] Parasti, L., & Feranika, A. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Anjungan Buana Wisata. *Journal of Applied Accounting and Business*, 3(1), 49-55.
- [4] Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- [5] Dini, H. Y. (2019). *Prosedur Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Dinas Pada PT Kereta Api Indonesia Divre II SUMBAR (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.
- [6] Inayah, L. (2022). *Analisis Prosedur Pelaksanaan Uang Muka Dinas Tetap dan Sementara pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya)*.
- [7] Nurmalasari, G. A. (2018). *Analisis Prosedur Permintaan dan Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Intern (Studi pada Perum Jasa Tirta I Kantor Pusat Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.
- [8] Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta Selatan: Salemba Empat\
- [9] Nurmalasari, G. A. (2018). *Analisis Prosedur Permintaan dan Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Intern (Studi pada Perum Jasa Tirta I Kantor Pusat Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.
- [10] Arista, M. D., Ayatullah, M. D., Umam, K., Ratri, I. N., & Suwardiyanto, D. (2024). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Uang Muka Kegiatan di Politeknik Negeri Banyuwangi. *Jurnal Informatika Polinema*, 10(4), 527-534.